

CERITA DAMPAK PROGRAM SIAP SIAGA

Mengatasi Kesenjangan Kebijakan dan Membangun Kapasitas Kajian Risiko Bencana (KRB) di NTB

Juni 2023

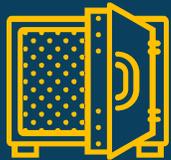
PROGRAM SIAP SIAGA NUSA TENGGARA BARAT

- Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan Manajemen Risiko Bencana di Indonesia dan keterlibatan Indonesia dan Australia pada manajemen bencana di Kawasan Indo-Pasifik.
- **Fokus dalam negeri** pada penguatan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana.
- **Fokus regional** untuk memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo Pasifik.
- Mendukung **prioritas Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan bencana** di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Indonesia 2015-2045.
- Bermitra dengan masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, sejalan dengan **Pendekatan *Pentahelix*** Pemerintah Indonesia.
- Program SIAP SIAGA menerapkan **pendekatan perubahan sistem untuk meningkatkan koherensi kebijakan dan kejelasan peran dalam sektor penanggulangan bencana** di Indonesia, berdasarkan hasil luas dari investasi sebelumnya di sektor ini selama 15 tahun terakhir.
- Program SIAP SIAGA bekerja erat dengan, dan memfasilitasi, pemangku kepentingan **untuk memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang ada** dan untuk memanfaatkan kegiatan dan program yang sedang berlangsung, jaringan, dan sumber daya, untuk membantu menghubungkan titik-titik di seluruh sistem dengan meningkatkan koordinasi, pembelajaran sejawat, dan kolaborasi.
- Di **NTB**, SIAP SIAGA mendukung prioritas pemerintah dalam perencanaan penanggulangan bencana dengan memfasilitasi pengkajian risiko bencana, harmonisasi data bencana dan integrasi sistem informasi, serta mendukung percepatan implementasi desa tangguh bencana.

BERPIKIR SECARA KREATIF: LOKALISASI PROSES PENGEMBANGAN KRB

Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 8182/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional dan Provinsi mengatur tentang proses, tahapan, metodologi, unit analisis data, parameter, bobot dan skor untuk penilaian risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat provinsi. Namun demikian, layanan penanggulangan bencana dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, dan ketiadaan KRB menghambat upaya pemerintah untuk mengembangkan rencana dan anggaran berbasis bukti, serta memberikan layanan pengelolaan bencana secara efektif. SIAP SIAGA mendukung pembaruan pedoman nasional yang akan mengatasi kesenjangan kebijakan ini, serta mendukung pemerintah kabupaten/kota sasaran untuk mengembangkan KRB berdasarkan prinsip lokalisasi untuk mempercepat penyediaan layanan penanggulangan bencana yang inklusif.

ISU 1



Minimnya anggaran KRB dalam Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Lombok Utara

ISU 2



Sumber daya teknis yang terbatas untuk memastikan KRB yang inklusif

ISU 3



Proses penyusunan yang panjang membutuhkan fasilitasi terus menerus untuk memastikan koherensi kebijakan

ISU 4



Perlunya konsultasi publik dan revisi berdasarkan umpan balik

ISU 5



Mendukung proses legalisasi KRB

MEMPERBAIKI KELEMAHAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA LOKAL

Kesenjangan:

Keterbatasan sumber daya teknis di BPBD Lombok Utara untuk mengembangkan KRB, termasuk untuk penilaian bahaya dan kerentanan dan membuat peta yang diperlukan, dll.

Pendekatan:

Pendekatan partisipatif dengan mengidentifikasi pemimpin **dari berbagai perwakilan pemangku kepentingan** dengan kapasitas untuk menyediakan, mengumpulkan, dan menganalisis statistik dan data spasial untuk pemetaan risiko. Tim penyusun yang terdiri dari 25 orang ini dibentuk dengan BPBD sebagai lembaga yang memimpin, BMKG untuk aspek hidrometeorologi, data dan pemodelan gempa bumi dan tsunami. Bappeda, dan aktor non-pemerintah (melalui Forum PRB) mendukung partisipasi dan keterlibatan yang berarti dari kelompok rentan dan terpinggirkan dalam analisis data dan spasial, dan sebagai bagian dari tim penyusun dan bantuan teknis. BNPB mendukung proses tersebut melalui Direktorat Evaluasi dan Pemetaan, memberikan masukan dan umpan balik, memastikan dokumen selaras dengan pedoman BNPB.

Hasil:

Pengembangan KRB untuk Kabupaten Lombok Utara telah **menciptakan contoh atau standar baru** dalam pengembangan regulasi dan proses perencanaan yang partisipatif di NTB yang dapat dijadikan panduan untuk upaya serupa di daerah lain dan telah menunjukkan **praktik yang baik** dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengisi kesenjangan kapasitas teknis.

MEMPERBAIKI KELEMAHAN KETERSEDIAAN DATA

Kesenjangan:

Kurangnya ketersediaan data statistik dan spasial di semua tingkatan (tingkat kabupaten hingga desa) untuk mendukung analisis sebagai bagian dari KRB.

Pendekatan:

Proses adaptif untuk pengumpulan data menggunakan data yang tersedia dari **instansi pemerintah** dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, dan dari **aktor non-pemerintah (termasuk OPD) tentang isu-isu kerentanan dan kapasitas**, dan data terpilah gender dan disabilitas. Data dianalisis di tingkat desa melalui proses **partisipatif dan multipihak** berdasarkan metodologi lokal yang disepakati yang berasal dari peraturan nasional.

Hasil:

KRB inklusif berbasis bukti untuk Lombok Utara diselesaikan dan disahkan pada Desember 2021, dan digunakan sebagai dasar untuk **proses perencanaan terkait**, termasuk pemutakhiran rencana penanggulangan bencana kabupaten dan percepatan strategi desa tangguh bencana.

MEMPERBAIKI KELEMAHAN MENILAI TITIK MASUK UNTUK KESELARASAN KEBIJAKAN

Kesenjangan:

Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2012 tidak mengatur parameter, unit analisis, bobot dan skor dalam komponen kapasitas dan kerentanan KRB Kabupaten/Kota sehingga menimbulkan **kesenjangan implementasi kebijakan**.

Pendekatan:

Tim Penyusun Kabupaten Lombok Utara yang multipihak didukung oleh BNPB dan SIAP SIAGA menyepakati tahapan, proses, metodologi, unit analisis di tingkat desa, parameter, bobot dan skor yang **relevan dengan konteks lokal** untuk melengkapi kapasitas dan komponen kerentanan berdasarkan prinsip/panduan berikut:

- Di tingkat nasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8182/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Risiko Bencana Nasional dan Provinsi
- Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penilaian Risiko Bencana

Hasil:

Proses penyusunan sangat berharga baik untuk **proses maupun produk akhir** (KRB). Ini termasuk membangun pemahaman tentang pedoman KRB, kesepakatan tentang metodologi, dan mengklarifikasi peran dan tanggung jawab untuk pengembangan peta bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko, dll.

“ SIAP SIAGA tidak hanya memfasilitasi pengembangan hasil utama, tetapi juga meninggalkan proses pembelajaran yang sangat berharga. Penyusunan Penilaian Risiko Bencana (*Disaster Risk Assessment*) memberi kami pengalaman bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data melalui proses kolaboratif sehingga kami dapat menyajikan kondisi risiko bencana di Lombok Utara secara komprehensif.

Agus Hery Purnomo; Subkoordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Lombok Utara

”

DAMPAK BERJENJANG DARI PROSES LOKALISASI

Dokumen KRB yang telah disahkan untuk Lombok Utara dapat digunakan sebagai sumber daya dan dasar yang kuat untuk proses perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Penanggulangan Bencana, perencanaan tata ruang dan penilaian dampak lingkungan, SERTA proses perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen KRB juga dapat memandu identifikasi program/kegiatan dan prioritas anggaran untuk mengurangi dampak risiko bencana.

Proses pengembangan KRB juga memiliki dampak yang berjenjang:

Peningkatan Kesadaran Peran BPBD

Kesadaran BPBD akan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan serta peluang untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan KRB telah diperkuat. BPBD telah merencanakan kegiatan untuk mengintegrasikan dokumen KRB yang ada (2021–2025) ke dalam Rencana Strategis dan Anggaran pada tahun 2025 serta memperbarui Rencana Penanggulangan Bencana berdasarkan KRB yang diperbarui pada tahun 2026.

Prioritas DIM

Relevansi KRB sangat bergantung pada ketersediaan data terkini dan terpercaya. BPBD tidak dapat menghasilkan data yang diperlukan sendiri karena membutuhkan data statistik dan spasial dari instansi pemerintah lain dan desa (sebagai unit analisis terkecil untuk KRB). Pengakuan bahwa sejumlah besar data tidak tersedia atau kedaluwarsa telah menyebabkan sejumlah tindakan lanjutan untuk meningkatkan sistem manajemen data dan informasi (DIM) provinsi untuk PRB.

SEBELUM

Pengembangan KRB kabupaten tidak diprioritaskan dalam rencana kerja kabupaten, meskipun diusulkan dalam rencana 5 tahun BPBD.

Rencana PB dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten Lombok Utara dikembangkan oleh konsultan independen tanpa mengacu pada KRB. Dengan demikian, rencana dan dokumen lain seperti rencana tata ruang, zona konservasi, dan infrastruktur publik di daerah rawan bencana tidak mendapat manfaat dari penilaian risiko bencana yang disepakati.

Proses partisipatif yang lemah dan penggunaan data sekunder dan terpilih yang tidak konsisten menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak mencerminkan situasi dan kebutuhan lokal secara memadai.

PERAN SIAP SIAGA



**PENILAIAN
SISTEM**



FASILITASI



**PENDUKUNG
PEMBELAJARAN**



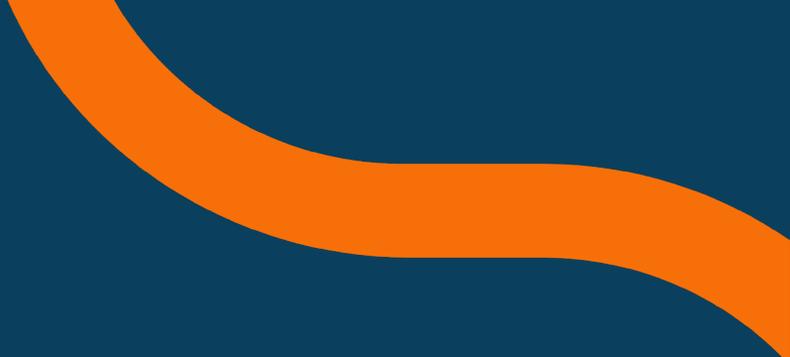
**BANTUAN TEKNIS
STRATEGIS**

SESUDAH

Pendekatan partisipatif meningkatkan kesadaran akan KRB sebagai dasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis bukti.

Pendekatan partisipatif yang diperkenalkan untuk mendukung persiapan proses DRA berfungsi sebagai pelatihan bagi tim penyusun KRB dalam mengembangkan dokumen independen (tanpa keterlibatan pihak ketiga), relevan, dan hemat biaya yang juga menghasilkan kepemilikan oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan sumber daya lokal menghasilkan praktik yang baik dalam pelokalan, pengembangan kebijakan inklusif/partisipatif dan prioritas DIM yang lebih baik dan inklusif.



TERIMA KASIH